

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 255,993,674 jiwa atau 3,5% dari jumlah penduduk dunia (CIA World Factbook, 2015). Seperti negara berkembang pada lainnya, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah berorientasi untuk meningkatkan konsumsi pada masyarakat berpendapatan rendah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibat dari kegiatan konsumsi dan produksi yang terus meningkat tersebut jumlah limbah yang dihasilkan juga terus bertambah (Polzer, 2015).

Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat seperti produksi dan konsumsi akan menghasilkan sisa maupun limbah yang sudah tidak terpakai lagi atau yang sering disebut sampah. Peningkatan jumlah sampah merupakan salah satu bentuk dampak negatif dari pembangunan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maupun produksi sampah yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan.

Permasalahan sampah merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh setiap kota/kabupaten di Indonesia. Berdasarkan pada data dari Kementerian Lingkungan Hidup (2012) dalam Kajian Timbulan dan Komposisi

Sampah Perkotaan (2015), volume sampah di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 200,000 m<sup>3</sup>/hari, dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2012 volume sampah di Indonesia 490,000 m<sup>3</sup>/hari. Berdasar kajian oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2008, sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih berpusat pada pembuangan akhir (TPS) yakni sebesar 69%, ditimbun 10%, dikomposkan dan daur ulang 7%, dibakar 5% dan tidak urus 7% (Kementirian Lingkungan Hidup, 2008 dalam Kajian Timbulan Komposisi sampah perkotaan DLH DIY,2015).

Kabupaten Sleman yang terletak di Provinsi D. I. Yogyakarta merupakan salah satu kabupaten yang memiliki penduduk yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Sleman. Menurut data dari BLH tahun 2015, rata-rata volume sampah dari perumahan di Kabuapten Sleman sebesar 0,46kg/orang/hari. Pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk sebesar 1,154,501 jiwa di Kabupaten Sleman memiliki volume sampah sebesar 15,166,00 m<sup>3</sup>/hari dan tahun 2015 jumlah penduduk sebesar 1,167,481 jiwa memiliki volume sampah sebesar 24,241,49m<sup>3</sup>/hari. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pertambahnya jumlah penduduk produksi sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat (data SLDH Sleman 2014-2015). Kecamatan Gamping merupakan salah satu sebagai penghasil sampah terbesar di Kabupaten Sleman, Kecamatan Gamping memiliki jumlah penduduk cukup tinggi. Karena kecamatan ini cukup strategis dengan pusat kota dan banyak fasilitas-fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari yang cukup lengkap.

**Tabel 1.1 Volume Sampah Rata-rata Per Hari di Kabupaten Sleman Per Kecamatan Tahun 2015**

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Volume Sampah
Mayundan	37,936	94,8
Minggir	39,069	97,7
Seyegan	69,501	173,8
Godean	75,990	190,4
<b>Gamping</b>	<b>97,060</b>	<b>248,5</b>
Mlati	98,378	245,9
Depok	132,445	331,1
Berbah	51,494	129,9
Prambanan	63,676	159,2
Kalasan	74,304	185,8
Ngemplek	63,002	157,6
Ngaglik	101,352	253,4
Sleman	69,501	173,8
Tempel	66,367	165,9
Turi	40,481	101,2
Pakem	38,838	97,1
Cangkringan	33,449	83,6

Sumber: BLH Kabupaten Sleman, 2015 data diolah

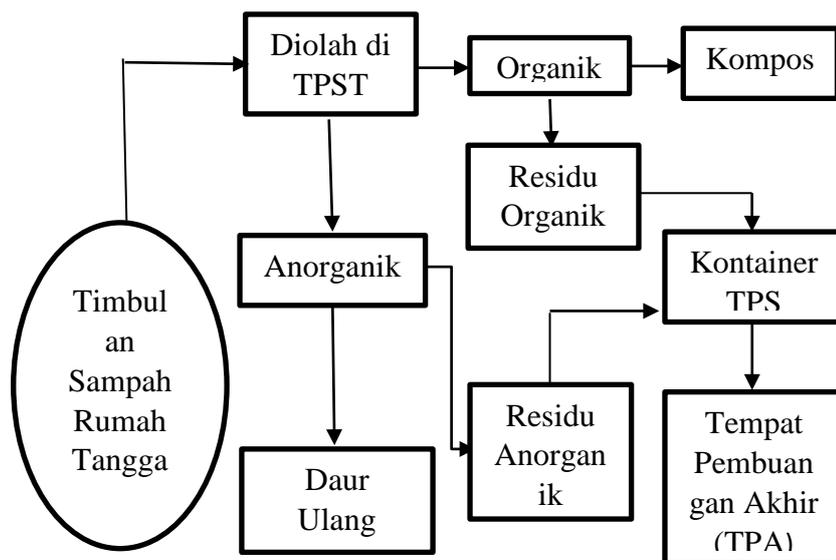
Tabel 1.1 Bahwa menggambarkan Kecamatan Gamping hanya menduduki peringkat keempat dalam jumlah populasi penduduk setelah Kecamatan Depok, Ngaglik, Mlati. Namun jumlah volume sampah lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan Mlati yang memiliki penduduk lebih banyak dari Kecamatan Gamping. Kecamatan Gamping pengelolaan sampah dilakukan secara Konvensional. Dengan cara sampah rumah tangga dibuang ke tong sampah yang ada di depan rumah lalu sampah tersebut diangkut oleh mobil sampah yang mengambilnya. Dan mobil sampah meletakkannya ke tempat pembuangan sementara (TPS), sehabis dari TPS lalu diangkut dengan truk sampah untuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Timbulnya sampah tidak bisa dihentikan, akan tetapi harus bisa dikelola, dikurangi atau diminimalisasi dengan baik. Menurut undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Bab I pasal I: dinyatakan bahwa pengelolaan

sampah adalah kegiatan yang sistematis dan menyeluruh meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan pada suatu daerah akan mempengaruhi kualitas lingkungan pada daerah tersebut meskipun dampaknya tidak terlihat secara langsung. Permasalahan dalam sampah perkotaan timbul akibat pengelolaan sampah yang tidak dilakukan dengan baik terutama di kota-kota besar di Indonesia. Sistem pengumpulan yang tidak tuntas, kurangnya alat angkut sampah, dan terbatasnya kapasitas tempat pembuangan akhir sampah (TPA) menjadi permasalahan yang khas mencakup aspek teknis, sosial, dan budaya (Pramono, 2003).

Di dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Merujuk pada pernyataan undang-undang bahwasanya pengelolaan sampah mencakup pengurangan dan penanganan sampah hingga harus segera diterapkan pengelolaan sampah yang terpadu. Pengelolaan sampah terpadu dilakukan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengelolaan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah yaitu bisa dilakukan di tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).

Selama perencanaan kebijakan lingkungan, penting untuk menyelidiki faktor sosial yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku lingkungan. Secara khusus agar kebijakan lingkungan menjadi efektif kepatuhan masyarakat sangat penting (Anderson, 2006). Oleh karena itu, pemerintah penting untuk menyelidiki persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Hal itu memang perlu persepsi dan kesadaran dari masyarakat, jika masyarakat lebih sadar dengan pengelolaan sampah maka timbulan sampah bisa dikurangi.



Sumber: Primasari, dkk (2010)

**Gambar 1.1** Pengelolaan Sampah Terpadu

Tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan Yogyakarta kondisinya semakin hari mengkhawatirkan, diprediksikan penuh dengan sampah. Tempat itu akan diperkirakan tidak akan mampu menampung sampah-sampah oleh 3 daerah yang ada di Yogyakarta yaitu Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Sebab sekitar 60 ton/harinya sampah terbuang di tempat tersebut. Di Kabupaten Sleman sendiri sekitar 3,200m<sup>3</sup>/hari membuang sampah di TPA Piyungan, guna mengurangi volume sampah yang ada di TPA Piyungan Pemerintah Kabupaten Sleman merencanakan untuk membangun tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST). Dinas lingkungan hidup (LBH) Bantul mencatat volume sampah daerah yang terangkut ke tempat Piyungan mencapai sekitar 60 ton/hari dari 3 daerah Yogyakarta itu sebelumnya mengalami peningkatan perharinya dibandingkan sebelumnya. Dikarenakan dari sampah wisata sekarang ini mulai meningkat, sebelumnya volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan sekitar 30ton/hari.

Studi sebelumnya, Saptutyingsih (2007) melakukan dengan metode *Contigent Value Method* untuk menilai program perbaikan kualitas air sungai Code di Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan *willingness to pay* untuk perbaikan kualitas air sungai di Yogyakarta. Perbaikan kualitas air sungai Code. Hasilnya ialah perbedaan pria dan wanita, pendapatan dan keberadaan anak dalam keluarga berpengaruh terhadap kemauan membayar sedangkan dengan lamanya tinggal dan level kualitas air sungai berpengaruh negatif terhadap kemauan untuk membayar (*willingness to pay*) buat perbaikan kualitas air sungai Code di Yogyakarta.

Usia berpengaruh negatif terhadap WTP dalam pengelolaan sampah menurut (Annisa, 2015; Dagnev, 2009; Rahji, 2012; Alnaa, 2011; Jones, 2010; Emalia, 2016), dan menurut (Dandy, 2014) usia berpengaruh positif terhadap WTP. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap WTP untuk pengelolaan sampah (Annisa, 2015; Dandy, 2014; Yuan, 2014; Murniawati, 2006). Pendapatan berpengaruh positif terhadap WTP pengelolaan sampah menurut (Saptutyingsih, 2007; Dandy, 2014; Anggela, 2014; Dagnev, 2009; Rahji, 2012; Yuan, 2014). Jumlah anggota keluarga berpengaruh positif terhadap WTP perbaikan pengelolaan sampah (Dandy, 2014),

sedangkan jumlah anggota berpengaruh negatif terhadap keinginan rumah tangga dalam pengelolaan sampah (Dagneu, 2009; Susanto, 2016). Jarak tempat tinggal dari lokasi TPA berhubungan negatif dengan WTP terhadap pengelolaan sampah (Anggela, 2014), sedangkan jarak tempat tinggal dari lokasi TPA berpengaruh positif menurut (Yuan, 2014). Persepsi masyarakat dari tanggung jawab pemerintah berhubungan positif terhadap WTP perbaikan pengelolaan sampah (Dagneu, 2009).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Gamping masih memiliki permasalahan-permasalahan yang bisa mengancam masyarakat. Apabila pengelolaan sampah di Kecamatan Gamping tidak diperbarui maka TPA Piyungan bisa jadi bom waktu bagi masyarakat dan lingkungan. Begitupun dalam jangka pendek dengan semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah maka beban Pemerintah semakin besar, untuk membiayai operasional dan sarana yang rusak.

Banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh banyak sampah di daerah perkotaan maupun perdesaan perlu adanya penanganan seperti pengelolaan sampah terpadu, sistem pengelolaan sampah terpadu berarti paling tidak mengkombinasikan pendekatan sumber sampah, daur ulang, pengkomposan dan pembuangan akhir. Namun untuk melakukannya serta adanya modal yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengelolaan tersebut, semuanya membutuhkan biaya sedangkan sampah yang ditimbulkan berasal dari aktivitas manusia, dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah pun berdampak pada manusia itu sendiri, seperti udara yang tercemar serta penyakit yang ditimbulkan dari sampah. Untuk itu di dalam penelitian akan mencoba untuk mencari berapa besar *Willingness To Pay* atau biaya yang mau

dibayarkan oleh masyarakat untuk Pengelolaan Sampah Terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping

Dari permasalahan di atas, beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa nilai *willingness to pay* terhadap pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping?
2. Bagaimana pengaruh usia terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terakhir terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan dengan tempat pembuangan akhir terhadap *willingness to pay* masyarakat untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping?
5. Bagaimana pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping?
6. Bagaimana pengaruh jarak tempat tinggal dari lokasi TPA terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping?
7. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat tentang tanggung jawab pemerintah mengenai pengelolaan sampah terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas penelitian ini bertujuan:

1. Mengukur besarnya *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping.
2. mengetahui pengaruh Usia terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping.
3. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terakhir terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping.
4. Mengetahui pengaruh pendapatan terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping.
5. Mengetahui pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping.
6. Mengetahui pengaruh jarak tempat tinggal dengan tempat pembuangan akhir terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping
7. Mengetahui pengaruh persepsi masyarakat tentang tanggung jawab pemerintah mengenai pengelolaan sampah terhadap *willingness to pay* pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga di Kecamatan Gamping.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan lingkungan dan manfaat bagi masyarakat terhadap pengelolaan sampah terpadu pada rumah tangga.

2. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelolaan dan para pengambil kebijakan dalam rangka pengelolaan sampah terpadu rumah tangga di Kecamatan Gamping.
3. Bagi akademisi hasil penelitian ini mampu dapat digunakan untuk penelitian lanjutan dalam bidang penelitian pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai bahan referensi.